

DARI GEREJA KE PANGGUNG POLITIK: STUDI TENTANG KEKUASAAN PENATUA DALAM POLITIK LOKAL DI MINAHASA

Romel Malensang

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sam Ratulangi
romelmalensang@ymail.com

Abstract: This article discusses about the phenomenon of penatua as the ruling elite in contemporary Minahasa. The research method used was case study with data collection process for five months (November 2014 - March 2015). The results of this study led to the conclusion that the political role of the Church in Minahasa especially, it is not solely done by the institution of the church itself. The church only becomes a power instrument of most elites embodied in the figure of penatua and then doubling their domination in the political sphere.

Keywords: penatua, church, local politics, Minahasa

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud menjelaskan fenomena politik atas keberadaan penatua sebagai elit lokal di Minahasa.¹ Penatua awalnya merupakan salah satu elit gereja di Gereja Masehi Injili di Minahasa yang dipilih secara berkala, yakni setiap 4 (empat) tahun sekali, dalam sebuah agenda pemilihan yang disebut Pemilihan Pelayan Khusus

(pilpelsus). Setiap individu yang memenuhi sejumlah persyaratan gerejawi berhak berkontestasi dalam pilpelsus untuk menjadi penatua. Dengan memenangkan kontestasi tersebut, mereka akhirnya memiliki legitimasi untuk masuk dalam kepemimpinan gerejawi dan mulai menjalankan dominasinya di ranah gereja.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena signifikansi kekuasaan yang melekat pada sosok penatua sebagai elit gereja tersebut justru dapat didayagunakan kembali menjadi sumber daya kekuasaan di ranah politik. Selain itu, perilaku penatua

¹Wilayah Minahasa yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah keseluruhan wilayah adat tradisional Minahasa yang juga menjadi wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Wilayah tersebut mencakup secara administratif: Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon.

sebagai elit cenderung berusaha mereproduksi kekuasaannya di ranah gereja dan politik dengan berbagai cara agar kekuasaannya tetap langgeng dan bertahan.

Proses berkuasanya penatua tidak terlepas dari serangkaian proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minahasa. Beberapa faktor seperti peristiwa panjang kolonialisasi dan proses akulturasi agama Kristen sangat berpengaruh menjadikan elit-elit tradisional semacam *tonaas* dan *walian* (Graafland, 1991; Schouten, 1998; Mamengko ed., 2001) yang di masa lalu memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Minahasa, berangsur-angsur tergusur legitimasi dan posisinya oleh para penatua yang berkuasa. Kekuasaan yang bersumber dari nilai-nilai adat perlahan digeser oleh kekuasaan yang bersumber dari gereja.

Kekuasaan yang diperoleh para penatua itu terutama ditopang oleh mencoloknya dominasi demografis pemeluk agama Kristen Protestan di wilayah Minahasa. Dilihat dari banyaknya jumlah jemaat dan luas wilayah pelayanan,

Gereja Masehi Injili di Minahasa (selanjutnya disingkat GMIM) adalah gereja terbesar diantara yang lainnya. Jumlah anggota jemaat GMIM mencapai 789.425 jiwa pada tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan. Selain jumlah konstituen yang banyak, GMIM juga memiliki aset yang melimpah. Bahkan secara finansial, GMIM tergolong fantastis karena mampu menggalang dana mencapai hampir 40 miliar rupiah pertahun melalui *voluntary funding* dari jemaat maupun sumber-sumber lokal lainnya (Henley dkk, 2007: 410-411). Kemegahan institusi GMIM ini akhirnya turut membawa penatua sebagai salah satu elit di dalamnya pada suatu posisi yang strategis.

Akses yang terbuka untuk mendayagunakan beberapa sumber daya gerejawi yang bernilai, membawa sejumlah penatua pada ruang kontestasi di ranah politik. Pada banyak kasus, beberapa kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah maupun legislatif di tingkat daerah teridentifikasi sebagai penatua. Uniknya, jabatan penatua yang

mereka miliki justru digunakan untuk mencari dukungan dalam aktivitas politiknya. Kecenderungan yang terjadi, para pemilih yang mayoritas adalah anggota jemaat GMIM biasanya terikat secara moral dan emosional untuk memilih serta memenangkan kandidat-kandidat tersebut. Fakta ini pula yang mengindikasikan bahwa terdapat potensi kuasa dalam jabatan penatua jika didayagunakan dalam suatu pertarungan politik di Minahasa.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka paparan bahasan dalam tulisan ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penting. *Pertama*, bagaimana pola kontestasi antar aktor yang berlangsung di ranah gereja dalam rangka mengejar jabatan penatua. *Kedua*, bagaimana kekuasaan penatua dalam gereja dikonversi dan terlegitimasi secara sosio-politis di Minahasa? Kepiawai-an penatua dalam memainkan peran dominan di berbagai ranah di tingkat lokal tersebut membuktikan kehebatan mereka berpolitik. Kehebatan mereka terlihat dari kemampuan mereka menerapkan berbagai pola strategi dan pendayagunaan ber-

macam sumber daya kekuasaan demi mendapatkan kepatuhan dari sasaran kekuasaan di berbagai ranah kehidupan.

Oleh karena itu, secara keilmuan, studi ini diharapkan memberi sumbangsih terhadap kekosongan kajian-kajian politik dalam menghayati perpolitikan yang tidak menggunakan label politik dan kecenderungan-kecenderungan berimpitnya praktik beragama dengan praktik berpolitik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah metode sistematis yang digunakan untuk menggali informasi tentang seseorang, *setting* sosial, peristiwa, atau kelompok yang memungkinkan peneliti untuk mengerti bagaimana proses tersebut berlangsung dan berfungsi (Berg, 2001: 225). Yin (2003: 13) memberikan definisi yang lebih teknis mengenai studi kasus, yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan

konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi-sumber bukti dapat dimanfaatkan.

Unit analisis yang ditempatkan dalam penelitian ini mengulas seputar aktor-aktor beserta proses politik yang berlangsung di ranah gereja dan politik lokal di Minahasa. Aktor-aktor yang dimaksud adalah para penatua GMIM yang diposisikan dalam bentuk jamak dan berupa komunitas, namun tiap aktor memiliki karakter dan aktivitas yang berbeda-beda. Untuk membedakan cakupan kekuasaan yang dihasilkan para aktor, maka level analisis disempit-kan hanya di wilayah GMIM saja yang mencakup keseluruhan wilayah Minahasa tradisional, yang mayoritas penduduknya adalah anggota jemaat GMIM. Untuk wilayah GMIM yang akan dianalisis lebih difokuskan pada komisi-komisi kategorial di aras sinode yang merupakan cakupan kekuasaan tertinggi penatua.

Pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu berdasarkan studi literatur, observasi, dan wawancara. Setelah itu, data dianalisis dengan cara reduksi data. Mereduksi data

diartikan sebagai merangkum data, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting (Sugiyono, 2009: 226). Dengan demikian, maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisis data yang dilakukan, yaitu setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya data dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/ penafsiran berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Kerangka Teori

1. Penatua sebagai Elit yang Berkuasa

Ada tiga model yang dapat digunakan menganalisis soal distribusi kekuasaan. *Pertama*, model elit berkuasa. Menurut model ini, sumber kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil orang saja. *Kedua*, model pluralis, dimana kekuasaan tersebar diantara beberapa kelompok sosial masyarakat. *Ketiga*, model kekuasaan populer atau populis, yaitu bahwa sumber kekuasaan telah menyebar luas diseluruh kalangan masyarakat (Agustino, 2007: 78-80; Andrain, 1992: 154-185). Dalam

upaya untuk menunjukkan peran strategis penatua dalam politik lokal di Minahasa, maka kerangka teoritik ini merujuk pada model pertama, yaitu model elit berkuasa.

Kajian mengenai elit berawal dari fakta bahwa ada perbedaan-perbedaan diantara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncul kelompok-kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya dalam masyarakat yang sama. Kelompok-kelompok itulah yang disebut kelompok elit. Pareto dan Mosca menegaskan hal tersebut dimana dalam setiap masyarakat pasti terdapat sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya (Haryanto, 1991: 3). Selanjutnya, sekelompok kecil individu tadi atau yang merupakan lapisan elit di masyarakat dibagi menjadi kelompok elit yang sedang memerintah atau (*governing elite*) dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah (*non governing elite*). Kelompok elit yang sedang memerintah terdiri atas orang-orang yang menduduki

jabatan-jabatan politis, dan kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri atas orang-orang yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung pembuatan kebijaksanaan.

Apa yang mendorong elit atau kelompok-kelompok elit memainkan peranan aktif dalam politik? Menurut Varma (1999:197) adalah karena adanya dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Karena dalam teori-teori kelompok dan elit, kekuasaan merupakan tujuan utamanya. Sehingga oleh Harold Laswell, elit kekuasaan atau elit yang berkuasa didefinisikan sebagai suatu kelas yang terdiri atas mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai-nilai (*values*) yang mereka bentuk (ciptakan, hasilkan) mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut mungkin berwujud kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lain. Mereka yang berhasil menguasai nilai-nilai tersebut dalam

jumlah yang banyak, pada gilirannya akan menduduki lapisan atas stratifikasi yang ada di masyarakat bersangkutan, sedangkan mereka yang kurang atau tidak berhasil sama sekali memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut, akan berada pada lapisan bawah dari stratifikasi (Haryanto, 2005: 126).

Selanjutnya, guna mengidentifikasi apakah penatua dapat dikategorikan sebagai elit yang berkuasa, khususnya di ranah gereja dan politik, maka penulis menggunakan strategi analisis posisi (Putnam, 1978: 84-87). Strategi ini beranggapan bahwa lembaga-lembaga atau struktur-struktur yang sifatnya formal, pada dasarnya merupakan suatu peta hubungan kekuasaan yang dapat digunakan untuk menganalisa siapa elit yang berkuasa. Oleh karena itu, para individu yang menduduki posisi-posisi puncak dalam lembaga atau institusi formal tersebut, cenderung secara politis berkuasa.

Faktanya, penatua memang berada pada posisi-posisi puncak di ranah gereja dan politik di Minahasa. GMIM yang menganut sistem

presbyteral sinodal memberikan celah bagi aktor non-pendeta untuk menduduki kursi kepemimpinan gereja. Berbeda dengan struktur hirarkis gereja katolik, misalnya yang menggunakan sistem episkopal dan mengerucutkan kewenangan hanya kepada para uskup saja. Di ranah politik, penatua banyak menduduki posisi-posisi puncak dalam institusi-institusi pemerintahan, partai politik, dan institusi politik lainnya.

Hal tersebut semakin menegaskan signifikansi kekuasaan penatua di Minahasa secara keseluruhan yang mayoritas penduduknya adalah anggota jemaat GMIM.

2. Strategi Kekuasaan Penatua

Dasar kerangka teoritik ini, meyakini bahwa strategi-strategi yang dikembangkan oleh para elit itu didukung oleh basis-basis yang mereka miliki sebagai sumber daya dalam berkontestasi. Berdasarkan sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, para elit kemudian perlu mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber daya-sumber daya itu sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan politik yang efektif.

Charles F. Andrain (1992: 144-151) menawarkan tiga variabel yang harus diperhatikan dalam membahas pen-dayagunaan sumber daya kekuasaan, yaitu: (1) jumlah dan distribusi sumber daya; (2) motivasi untuk mendayagunaan sumber daya demi tujuan-tujuan politis; dan (3) keterampilan mendayagunakan sumber daya secara efektif. Untuk membahas kepatuhan yang dihasilkan, Andrain menawarkan dua variabel yang lain, yaitu: (1) cakupan kekuasaan (sektor-sektor masyarakat atau jenis-jenis kegiatan yang dapat ditembus oleh alat-alat kekuasaan); dan (2) besaran kekuasaan (ke dalam-an perilaku masyarakat yang dapat dikendalikan elit).

Adapun yang menjadi sumber daya kekuasaan tersebut dibedakan menjadi lima tipe, yaitu: fisik, ekonomi, normatif, personal, dan ahli (informasional) (Andrain, 1992: 132-134). *Sumber daya fisik* dijalankan berdasarkan beraneka ragam persenjataan fisik sesuai dengan tingkat industrialisasi masyarakat. Sumber daya fisik dapat berupa persenjataan sederhana, seperti

tombak, busur, dan panah bagi masyarakat tradisional dan berskala kecil. Ataupun berupa persenjataan mutakhir seperti senjata api, balistik, dan nuklir bagi masyarakat modern. Apapun jenis persenjataan yang digunakan, motif utama dari kepatuhan masyarakat bersumber dari kekhawatiran akan cedera fisik jika tidak patuh. *Sumber daya ekonomi* dapat diperoleh melalui kepemilikan sumber daya material tertentu seperti alat-alat teknologi, kekayaan, pendapatan, hak milik, kontrol atas barang dan jasa. Dengan demikian, elit dapat mendominasi masyarakat melalui imbalan-imbalan material tersebut kepada masyarakat. *Sumber daya normative* didasarkan pada kualitas-kualitas tertentu seperti kebijakan religius, kebenaran moral, dan wewenang sah. Unsur-unsur tersebut memberi elit hak moral untuk menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan melambangkan keyakinan-keyakinan moral yang dianut bersama dalam sebuah komunitas. Pemimpin-pemimpin agama dan politik sama-sama bertumpu pada sumber daya

normatif ini yang dikaitkan dengan suatu jabatan atau peranan. *Sumber daya personal* dapat berupa kualitas-kualitas personal tertentu seperti menawan, menarik, berkharisma, disayangi, dan lain sebagainya. Pada situasi politik yang kurang stabil, tipe sumber daya ini cenderung mempunyai pengaruh yang signifikan untuk digunakan, sedangkan, *sumber daya keahlian* kerap dijumpai pada masyarakat yang birokrasinya cukup mapan. Sumber daya keahlian dapat berupa informasi, pengetahuan, keahlian teknis, dan intelijensi. Jadi, kepatuhan diperoleh karena memiliki informasi yang lebih luas. Adapun informasi-informasi itu mencakup pengetahuan mengenai nilai-nilai dan norma-norma umum, pengoperasian lembaga-lembaga politik dan struktur-struktur sosial lainnya, tuntutan-tuntutan politik dan dukungan yang dibuat kelompok-kelompok tertentu, serta metode-metode untuk menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Di era kontemporer saat ini, dengan semakin menyatunya iklim birokrasi politik dan industrial, maka para teknokrat lebih leluasa mendominasi

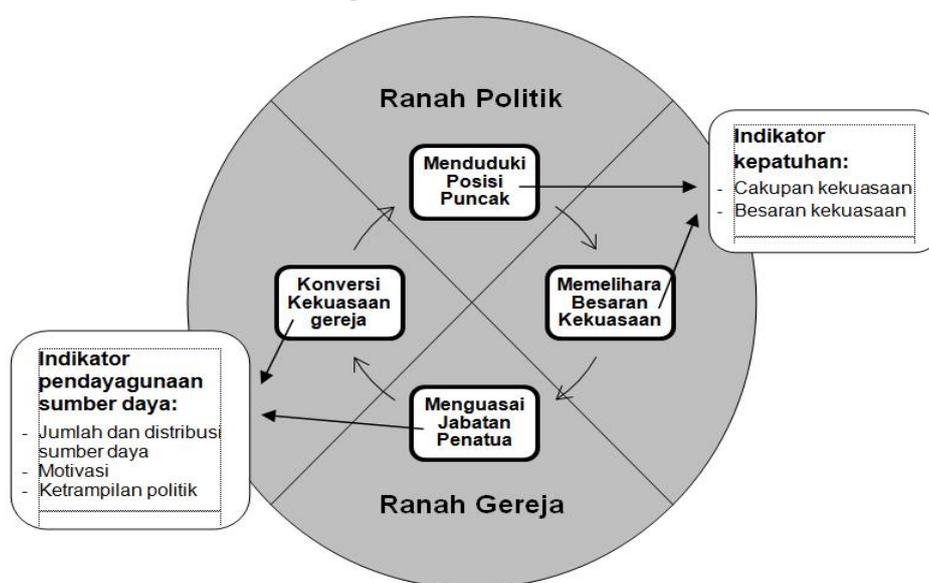
ranah kekuasaan melalui keahlian mereka.

Berangkat dari kerangka teoritik di atas, penulis meng-asumsikan bahwa kemunculan penatua sebagai elit lokal di Minahasa kontemporer terkait dengan beberapa hal. *Pertama*, penatua memiliki kecenderungan sebagai elit dominan, karena berada dalam posisi puncak institusi utama formal (gereja dan pemerintahan) di Minahasa. *Kedua*, ranah gereja merupakan arena pertarungan elektoral dalam mengakses jabatan penatua. Individu-individu yang berkontestasi menggunakan berbagai strategi dan sumber daya agar dapat memenangkannya. Aktivitas ini sekaligus menempatkan individu tersebut dalam kepemimpinan gereja. *Ketiga*, kekuasaan yang telah didapatkan penatua dalam gereja, dapat dikonversi untuk mendominasi ranah lainnya, yaitu ranah politik di Minahasa. Reproduksi kekuasaan tersebut berlangsung dengan menggunakan strategi kekuasaan yang serupa, terutama melalui gereja sebagai sumber daya utama. *Keempat*, akumulasi dari kekuasaan

penatua di ranah gereja dan ranah politik dipelihara dengan melanggengkan cakupan kekuasaan serta besaran kekuasaan yang diterima dari

masyarakat. Secara sederhana alur berpikir penulis dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 1.
Skema Strategi Kekuasaan Penatua di Minahasa



Pembahasan

Minahasa dari Waktu ke Waktu

“Minahasa is a most fruitful region for anyone who studies the conditions of changing traditions” (Wil Lundström-Burghoorn, 198: 6).

Kutipan di atas mungkin dapat menggambarkan situasi dan kondisi Minahasa sebagai entitas bangsa dan budaya yang senantiasa mengalami perubahan. Bagaimana bentuk-bentuk perubahan yang terjadi serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat Minahasa adalah yang

menjadi pokok uraian pada bagian selanjutnya.

Secara fisik, Tanah Minahasa adalah semenanjung seluas ± 5.000 km² yang terletak di bagian Utara Pulau Sulawesi. Daerah ini termasuk daerah yang memiliki banyak sekali gunung. Bahkan dalam catatan perjalanannya di Minahasa, Graafland menyebutkan bahwa Minahasa bukanlah daerah yang bergunung, dia lebih suka menyebutnya sebagai daerah yang seluruhnya terdiri atas pegunungan (Graafland, 1991: 4). Di

atas pegunungan-pegunungan itu, menjulang tinggi sejumlah gunung yang beberapa diantaranya sesekali menampakkan aktivitas, bahkan ada yang sangat aktif sehingga menyebabkan gempa bumi dan muntahan abu vulkanik dalam jumlah tertentu. Diantaranya adalah, Gunung Klabat, Gunung Lokon, dan Gunung Soputan.

Dahulu, sebelum Minahasa beragama Kristen, penduduk Minahasa lebih dikenal dengan nama *bergbewoners* atau *bergbevolking* atau *alfoeren*, dalam istilah setempat disebut “orang gunung” (Pantouw, 2002: 57). Adapun kata “*Minahasa*” itu sendiri, artinya “dijadikan satu” (Schouten, 1998: 11). Sehingga jelas bahwa masyarakat Minahasa pada mulanya bukanlah sebuah masyarakat etnik yang homogen. Terdapat kelompok-kelompok sub-etnik yang menjadi bagian dari suku bangsa Minahasa. Berdasarkan kriteria bahasa/ dialek, orang Minahasa dapat dibagi dalam delapan subetnik, yaitu Tonsea, Tombulu, Toulour, Tontemboan, Tonsawang, Bentenan (atau Ratahan), Ponosakan, dan Bantik (Schouten, 1998:13).

Kelompok-kelompok sub-etnik tersebut, tersebar di daerah-daerah pegunungan, pesisir pantai serta pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Minahasa.

Unit politik yang paling dikenal pada masa Minahasa kuno disebut *walak*. Lundström-Burghoorn (1981:56-62) menjelaskan bahwa yang disebut *walak* ialah suatu kelompok desa dengan penduduknya. Biasanya, semua orang yang hidup dalam suatu *walak* mempunyai pertautan darah satu sama lain dan mempunyai garis keturunan yang sama. Sejauh ini, yang diketahui sebagai dokumen kolonial pertama yang mencatat adanya *walak-walak* itu, adalah kontrak Minahasa-Belanda (VOC), pada 10 Januari 1679. Pada bagian awal naskah itu ditunjukkan dua pihak yang bersepakat, lengkap dengan nama-nama *walak* di Minahasa kala itu, yaitu: Ares, Kalabat Bawah, Kakaskasen, Tomohon, Tombariri, Saronson, Manado, Kalabat atas, Tonsea, Tondano, Remboken, Kakas, Tonkimbut bawah, Tonkimbut atas, Rumoong, Tombasian, Langowan,

Tompaso, Bantik, Tonsawang, Pasan, Ratahan, dan Ponosakan (Marunduh, 1997: 35-36). Dalam perkembangannya, kesatuan walak-walak ini terus mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang jumlahnya.

Walak dipimpin oleh seorang pemimpin kampung yang disebut kepala *walak*. Selain kepala *walak*, ada beberapa sosok pemimpin lain yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Minahasa Kuno, yaitu *walian* dan *tonaas*. Pekerjaan *walian* adalah memimpin ritual-ritual keagamaan Minahasa kuno yang disebut *foso* (Graafland, 1991:112), sedangkan *tonaas* dapat juga berarti “*leader*” atau “*specialist*” dalam sebuah aktivitas berkonotasi religi masyarakat pribumi Minahasa (Schouten, 1998: 22).

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa (terutama Belanda), serangkaian proses perubahan sosial terjadi perlahan dalam struktur masyarakat Minahasa. Melalui “kontrak-kontrak” (10 Januari 1679, 10 September 1699, 5 Agustus 1790) yang mereka tawarkan, kompeni

(VOC) mulai mendominasi tanah Minahasa begitupun dengan elit-elitnya, nyaris tanpa perlawanan. Proses perubahan sosial semakin menguat tatkala kristenisasi oleh para utusan lembaga *zending* dan para misionaris mengalami kesuksesan besar sekitar abad ke-16. Elit-elit tradisional seperti *walian* dan *tonaas* semakin kehilangan otoritas mereka sebagai hasil dari proses kristenisasi tersebut, hingga saat ini.

Kontestasi Elit dalam Gereja: Mengejar Jabatan Penatua

“...Mereka melihat jabatan (penatua) itu sebagai kesempatan untuk naik status. Dan kecenderungan orang umumnya begitu. Masyarakat yang non pendeta yang mau jadi pemimpin (gereja) mem-pergunakan itu..” (H.W.B. Sumakul, Ketua Sinode GMIM).

“...Jabatan penatua yang dulunya tidak disukai orang, sekarang menjadi seperti sesuatu yang bergengsi. Orang lebih suka kalau dia pakai (gelar) penatua daripada dia pakai (gelar) doktor...” (Jantje Wowiling Sajow, Bupati Kabupaten Minahasa 2013-2018)

Dua petikan hasil wawancara di atas memperlihatkan betapa jabatan penatua menjadi primadona dalam masyarakat Minahasa kontemporer.

Gereja yang merupakan sumber akses jabatan ini sekaligus menjadikannya ranah bertemu individu-individu dengan berbagai kepentingan. Hal itu justru dikarenakan potensi kuasa yang melekat di dalamnya. Kepentingan yang berbeda menghasilkan motivasi yang berbeda pula dalam memperebutkan jabatan penatua.

Terbentuklah sebuah pola kontestasi antar individu yang ditandai dengan pertarungan strategi politik dengan kepiawaian masing-masing individu dalam mengorganisasikan serta mendayagunakan sumber daya-sumber daya mereka.

GMIM: Cakupan Kekuasaan Penatua

Gereja ini memiliki sejarah pembentukan yang sangat panjang sejak masih bernaung pada badan-badan penginjilan barat seperti NZG dan *Indische Kerk*. Sampai pada 30 September 1934 akibat perubahan kebijakan dari *Indische Kerk*, maka GMIM resmi berdiri sendiri (Assa, 2003: 24). GMIM tersusun dari tiga aras: Sinode, Wilayah, dan Jemaat. Aras Sinode merupakan pusat

persekutuan wilayah-wilayah dan jemaat-jemaat atau dapat dikategorikan sebagai aras tertinggi di GMIM. Aras wilayah merupakan aras *intermediary* antara sinode dan jemaat. Ada 110 wilayah GMIM yang membagi tanah Minahasa. Sedangkan pada tingkatan paling bawah adalah jemaat yang totalnya berjumlah 924 jemaat. Jemaat masih membawahi juga kolom-kolom. Kolom biasanya menghimpun sekitar 15 sampai 25 kepala keluarga dan dipimpin oleh seorang penatua dan syamas. Para anggota kolom berkumpul seminggu sekali dalam sebuah pertemuan ibadah yang sekaligus menjadi ranah interaksi saling tukar menukar informasi.

Keputusan-keputusan gereja diambil dalam sebuah sidang majelis di masing-masing aras. Sidang Majelis Sinode merupakan pengambil keputusan tertinggi. Sebagai pelaksana atau mandataris keputusan, sidang majelis adalah badan pekerja. Badan pekerja terdiri atas Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ), Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW), dan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS). Badan Pekerja

tertinggi adalah Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) yang dipilih melalui pemungutan suara secara langsung, rahasia dan tertulis dalam sebuah Sidang Majelis Sinode. Terdapat pula perangkat lain yang disebut Komisi Pelayanan Kategorial (kompelka). Kompelka terdiri atas Komisi Pelayanan Anak, Komisi Pelayanan Remaja, Komisi Pelayanan Pemuda, Komisi Pelayanan Wanita/ Kaum Ibu, dan Komisi Pelayanan Pria/ Kaum Bapa (kelima kompelka ini biasa disingkat BIPRA). Komisi-komisi tersebut diketuai oleh seorang penatua. Ketua kompelka secara otomatis masuk sebagai anggota *ex-officio* badan pekerja. Masa kepemimpinan badan pekerja dan komisi pelayanan kategorial adalah selama empat tahun.

Pada level praktis, penatua memiliki peran serta pengaruh yang lebih besar terhadap jemaat ketimbang pendeta. Terlebih bagi, penatua yang memimpin kompelka BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak). Kepemimpinan dalam kompelka BIPRA memberi peluang bagi penatua untuk secara

langsung berelasi serta berinteraksi dengan anggotanya masing-masing. Dengan demikian, antara penatua dan jemaat terjalin suatu ikatan yang kuat, yang sewaktu-waktu dapat didayagunakan demi tujuan politis. Berdasarkan struktur GMIM yang telah dibahas di atas, terlihat bahwa cakupan kekuasaan penatua mencapai jangkauan terluas jika berada pada posisi kepemimpinan di aras sinode.

Pilpelsus: Ranah Kontestasi Elit

Sistem kepemimpinan GMIM yang diatur secara *presbyteral sinodal* memungkinkan siapa saja, asalkan dia warga GMIM, untuk dapat menduduki jabatan penatua. Inilah yang kemudian menarik minat banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi penatua. Bagi beberapa orang, jabatan penatua itu menjadi sasaran empuk untuk dijadikan instrumen meraih kekuasaan di Minahasa. Di satu sisi, terkandung potensi kuasa yang melimpah dalam jabatan penatua. Namun di sisi lain, jabatan tersebut berada dalam ruang kontestasi yang mengharuskan kompetisi antar aktor

untuk mendapatkannya. Pilpelsus merupakan ruang kontestasi itu. Pilpesus adalah agenda pemilihan pelayan khusus termasuk penatua. Kegiatan ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali oleh panitia pemilihan yang melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemilihan yang dikeluarkan oleh BPMS. Pilpelsus diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi dari jemaat untuk memilih pemimpin gerejanya secara langsung.

Berdasarkan definisi Andrain, kekuasaan tidak lain adalah “*penggunaan sejumlah sumber daya untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain*” (Andrain, 1992: 130-132). Maka, perjuangan untuk meraih kekuasaan, termasuk dalam pilpelsus, pada dasarnya merupakan suatu pola hubungan antara elit dan jemaat sebagai salah satu sasaran kekuasaan. Elit berperan mengorganisasikan aset dan kemampuannya berupa “sumber daya kekuasaan”, guna menghasilkan pola “tingkah laku menyesuaikan” dari jemaat. Apabila merujuk pada indikator jumlah dan distribusi kekuasaan, ada beberapa sumber

daya yang sekiranya sering digunakan dalam pilpelsus. *Pertama*, pendayagunaan sumber daya ekonomi atau material. Praktik-praktik penggunaan sumber daya ekonomi sebagai basis meraih kekuasaan terbukti efektif menjamin elektabilitas seorang calon penatua. Bentuknya sangat beragam, mulai dari pemberian uang, penghapusan hutang, hingga membagikan barang-barang kepada jemaat agar memilih yang bersangkutan menjadi penatua, sangat lazim terjadi. Sebuah contoh paling sederhana seperti yang diceritakan penatua Jantje W. Sajow:

“...ada, politik uang itu ada. Contoh konkrit, ada calon penatua yang ba warong (red: punya warung), dia bilang; sudah ngoni pe utang pemutihan (red: hutang kalian dianggap lunas), mar inga akang pa kita, pilih akang pa kita (red: tapi ingat saya, pilih saya). Itu kan secara nyanda (red: tidak) langsung dia menggu-nakan cara-cara seperti itu. Itu kejadian pa torang pe kampung (red: di kampung kami); pilih pa dia dengan catatan pemutihan itu di warong (red: pilih dia dengan catatan hutang di warung lunas). Jadi banyak orang jadi penatua dengan menggunakan uang. Segala cara lain misal dia pangge pigi makang (ajak pergi makan)...fakta sekarang itu, fakta politik...”

Di tempat terpisah, peneliti mewawancarai salah seorang penatua kompelka pemuda yang mengikuti sidang pemilihan ketua Kompelka Pemuda Aras Sinode Tahun 2014. Ia menceritakan:

“...Memang kalau pemilihan pemuda sinode ada noh torang da dapa waktu itu. Pertama dorang Sandi kase menginap torang yang perwakilan Minsela di hotel. Waktu menginap dia kase tip dalam bentuk doi dengan catatan pilih pa dia. Kalau dorang Toar kita nyanda tau, tapi mungkin ada dan lebe kuat makanya menang...”

“(red: saat pemilihan ketua pemuda sinode, kami diberi ‘sesuatu’ waktu itu. Pertama, ke-lompok pendukung Sandi, mereka beri penginapan gratis di hotel, khusus untuk kami utusan Minahasa Selatan Atas. Saat di hotel, mereka beri kami uang, dengan catatan pilih dia sebagai ketua pemuda sinode. Kalau kelompoknya Toar, saya tidak tahu, tapi mungkin ada juga seperti itu dan lebih kuat tentunya)”.

Cerita-cerita di atas dengan jelas mengindikasikan bahwa dalam kondisi tertentu sumber daya material (uang) turut menentukan tingkat keberhasilan seorang kandidat dalam pertarungan Pilpelsus. Fenomena ini tentu saja merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan jika terjadi dalam

lingkungan gereja sebagai sebuah institusi keagamaan.

Kedua, pendayagunaan sumber daya personal yang dikombinasikan dengan sumber daya normatif. Beberapa kandidat yang menarik secara personal (berkharisma, populer, disayangi, dan lain sebagainya) dengan mudah terpilih sebagai penatua meskipun mereka tidak memiliki sumber daya ekonomi yang menonjol. Beberapa jemaat serta tokoh gereja yang penulis wawancarai sepakat bahwa sumber daya personal ini adalah yang semestinya menjadi ukuran utama dalam memilih penatua. Berdasarkan keyakinan tersebut, seorang kandidat yang memiliki kualitas personal tertentu lebih mudah mentransformasikan sumber daya personal itu menjadi sumber daya normatif, yakni hak moral untuk memerintah dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan-keyakinan moral yang dianut bersama. *Ketiga*, pendayagunaan sumber daya keahlian. Sebagai suatu lembaga sosial yang mapan, GMIM tentu saja memprioritaskan kandidat-kandidat yang memiliki keahlian teknis yang

mumpuni. Keahlian teknis yang menonjol terutama menyangkut keahlian berteologi secara praktis (Gara, 2002: 17).

Kepemilikan sumber daya tidak selamanya menjamin keberhasilan dalam sebuah kontestasi pilpelsus. Para calon penatua belum tentu dapat berhasil jika tidak berangkat dari suatu motivasi. Umumnya, semua kandidat mengatakan bahwa motivasi mereka menjadi penatua adalah menyangkut “panggilan iman” oleh Tuhan sebagai kepala gereja itu sendiri. Walaupun dalam kenyataannya motivasi semacam ini sulit diukur secara cermat dalam pribadi masing-masing kandidat. Bahkan, tidak jarang mereka justru digerakkan oleh motivasi pihak lain seperti partai politik yang melihat peluang kekuasaan dalam jabatan penatua yang diincar kandidat tersebut.

Jika motivasi dapat mempengaruhi keputusan untuk “menggunakan” sumber daya, indikator selanjutnya, yakni keterampilan politik berguna untuk “mengorganisasikan” sumber daya secara efektif. Selain faktor karakter

pribadi yang berhubungan dengan motivasi, dan juga penempatan waktu serta energi yang tepat dalam mendayagunakan sumber daya kekuasaan; faktor penting lainnya berhubungan dengan lingkungan yang dapat memberi peluang dan hambatan. Jika mengikuti pendapat Giddens tentang strukturasi, lingkungan tersebut tidak lain adalah struktur yang dapat memberi pembatasan atau kekangan (*constraining*) namun di satu sisi dapat juga memberdayakan (*enabling*) agensi (pelaku, kandidat) (Giddens, 2011: 20-35). Dalam konteks ini, struktur dijemakan sebagai organisasi gereja yang mempunyai *rules* dan *resources*. Gereja dapat memberi pengekan terhadap eksistensi kandidat berdasarkan *rules* yang dimilikinya. Misalnya, ketika gereja mengatur kriteria bakal calon Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS), salah satu poinnya adalah tidak menjadi pengurus partai politik. Dengan aturan tersebut, gereja mengekang keterlibatan elit-elit politik yang berafiliasi dengan partai politik untuk mengikuti salah satu tahapan

pilpelsus di tingkat sinode. Namun, pada pilpelsus tahun 2010, misalnya beberapa nama yang akhirnya terpilih menjadi ketua Kospelka sekaligus anggota *ex-officio* BPMS diketahui adalah elit partai politik. Persoalan yang hampir serupa juga mewarnai pilpelsus tahun 2014 (<http://www.hariankawauapost.com/wp/2014/03/29/ada-ketua-parpol-di-mps/>). Fakta-fakta tersebut sebenarnya memperlihatkan suatu keterampilan politis dari para kandidat. mereka mampu menyasiasi kekangan aturan-aturan gerejawi yang dapat menghambat strategi politik mereka dalam gereja.

Menggandakan Dominasi di Ranah Politik

Berdasarkan data yang berhasil penulis kumpulkan, dalam rentang tahun 2008-2015 setidaknya ada sekitar 53 orang penatua yang telah menduduki posisi-posisi puncak dalam lembaga pemerintahan (eksekutif-legislatif). Data di bawah semakin menegaskan fakta dominannya eksistensi penatua dalam ranah politik di Minahasa saat ini. Kekuasaan di ranah gereja yang telah terlebih dahulu diperoleh menjadi sumber daya paling utama bagi mereka dalam menggandakan dominasi di ranah politik.

Tabel 1.

Beberapa Posisi Penatua dalam Ranah Politik di Minahasa

Nama Penatua	Posisi
Pnt. Djouhari Kansil	Wakil Gubernur Sulawesi Utara (2010-2015)
Pnt. Jantje Wowiling Sajow	Bupati Minahasa (2013-2018)
Pnt. Ramoy Luntungan	Bupati Minahasa Selatan (2005-2010)
Pnt. Jefferson S.M. Rumajar	Walikota Tomohon (2010-2015)
Pnt. Jimmy Rimba Rogi	Walikota Manado (2005-2010)
Pnt. Vicky Lumentut	Walikota Manado (2010-2015)
Pnt. Jeremia Damongilala	Wakil Bupati Minahasa Tenggara (2008-2013)
Pnt. Marhany Pua	Anggota DPD RI (2009-2014)
Pnt. Teddy A.H. Kumaat	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)

Pnt. Hanny J. Pajouw	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Ferdinand Mewengkang	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. James Karinda	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Herry Tombeng	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Netty Agnes Pantow	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Eddison Masengi	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Billy Lombok	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Steven Kandouw	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Vonny Paat	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Ingrid Sondakh	Anggota DPRD Sulut (2014-2019)
Pnt. Arthur Rahasia	Anggota DPRD Manado (2014-2019)
Pnt. Hengky Kawalo	Anggota DPRD Manado (2014-2019)
Pnt. Sonny Lela	Anggota DPRD Manado (2014-2019)
Pnt. Lineke Kotambunan	Anggota DPRD Manado (2014-2019)
Pnt. Royke Anter	Anggota DPRD Manado (2014-2019)
Pnt. Ivone Rarang	Anggota DPRD Minahasa Selatan (2014-2019)
Pnt. Jopie Mongkaren	Anggota DPRD Minahasa Selatan (2014-2019)
Pnt. Rommy Pondaag	Anggota DPRD Minahasa Selatan (2014-2019)
Pnt. Denny Sompie	Anggota DPRD Minahasa Utara (2014-2019)
Pnt. Berty Kapojos	Ketua DPRD Minahasa Utara (2014-2019)
Pnt. Joseph Dengah	Anggota DPRD Minahasa Utara (2014-2019)
Pnt. Johan F. Watung	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. Rudy Kaunang	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. Rommy Leke	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. Piere Makisanti	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. James A Kjongian	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. Careig N Runtu	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)

Pnt. Ventje Mawuntu	Anggota DPRD Minahasa (2014-2019)
Pnt. Piet Hein Kliwon Pungus	Anggota DPRD Tomohon (2014-2019)
Pnt. Frets Herdi Keles	Anggota DPRD Tomohon (2014-2019)
Pnt. Milky Junita Linda Wenur	Anggota DPRD Tomohon (2014-2019)
Pnt. Hudson D. N. Bogia	Anggota DPRD Tomohon (2014-2019)
Pnt. Chen Herman Mongdong	Anggota DPRD Tomohon (2014-2019)
Pnt. Youddy Yan Yopyy Moningka	Anggota DPRD Tomohon (2014-2019)
Pnt. Temmy Naray	Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019)
Pnt. Nolly Langingi	Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019)
Pnt. Meldy Untu	Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019)
Pnt. Vocke Ompi	Anggota DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019)
Pnt. Taviv Watuseke	Ketua DPRD Minahasa Tenggara (2014-2019)
Pnt. Santy G. Luntungan	Ketua DPRD Bitung (2009-2014)
Pnt. Maurits Mantiri	Wakil Ketua DPRD Bitung (2014-2019)
Pnt. Moktar Parapaga	Anggota DPRD Bitung
Pnt. Nabsar Badoa	Anggota DPRD Bitung (2014-2019)
Pnt. Djon Cornelius Hamber	Anggota DPRD Bitung (2014-2019)

Sumber: Dihimpun dan Diolah dari Beberapa Sumber.

Motivasi Penatua untuk Berpolitik

Jika “panggilan iman” sering menjadi alasan dan motivasi seseorang ingin menjadi penatua, maka “tanggung jawab pelayanan” adalah motivasi lanjutan penatua untuk terjun ke ranah politik. Mereka menganggap bahwa ranah politik adalah wilayah yang juga harus digarap sebagai medan pelayanan mereka sebagai penatua. Jadi, tanggung jawab sebagai pelayan khusus untuk melayani Tuhan, tidak sebatas di gereja namun mencakup keseluruhan ranah kehidupan, termasuk politik. Kegagalan bagi mereka ketika sebagian jemaat memandang bahwa politik itu kotor dan harus dipisahkan dari tugas pelayanan penatua. Persoalan ini juga nampaknya masih menjadi perdebatan di kalangan teolog-teolog gereja itu sendiri, yaitu berkaitan dengan apakah gereja dapat berpolitik atau sebaliknya. Meski demikian, beberapa penatua yang penulis wawancarai mayoritas menyepakati bahwa aktivitas politik dan pelayanan gereja bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Bagi

mereka, keputusan untuk menjalankan dominasi di luar ranah gereja nampaknya lebih didorong oleh alasan-alasan yang ideologis. Walaupun bukan hanya semata-mata motif ideologis tersebut yang menggerakkan penatua untuk berpolitik, namun paling tidak ada suatu keyakinan atas arti penting tujuan yang hendak dicapai.

Sumber Daya Normatif dalam Mengkonversi Kekuasaan Gereja

Dalam sebuah kontestasi di ranah politik, sumber daya yang cenderung paling menguntungkan penatua adalah sumber daya normatif, sedangkan sumber daya lainnya seperti sumber daya material, personal, dan keahlian kelihatannya memang digunakan juga oleh sejumlah penatua dalam beberapa kasus, namun kadar penggunaannya cenderung bervariasi dan tidak menonjol dibanding dengan kandidat-kandidat lain yang non-penatua. Oleh karena itu, sumber daya normatif akan dikategorikan sebagai jenis sumber daya yang paling utama digunakan penatua.

Dengan menggunakan sumber daya normatif, penatua dapat menggandakan kekuasaannya justru melalui status kepenatuaan yang melekat dalam dirinya sendiri. Sumber daya normatif ini terbukti efektif untuk didayagunakan khususnya pada masyarakat yang memiliki sebuah simpul “identitas bersama” (Andrain, 1992: 77). Identitas bersama masyarakat Minahasa yang masih terus terpelihara hingga sekarang ini berupa nilai-nilai kekristenan yang mewujud dalam institusi gereja. Nilai-nilai gerejawi tersebut masih cukup abstrak jika diterjemahkan secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah simbol konkrit yang dapat menampilkan nilai-nilai tersebut. Salah satunya mewujud pada status penatua. Jabatan penatua itu sendiri pun, dapat “disimbolkan kembali” menjadi banyak simbol yang menandakan kepenatuaan seorang penatua.

Agar sumber daya normatif ini efektif didayagunakan, maka nilai-nilai identitas bersama tersebut cenderung senantiasa dilanggengkan.

Salah satu strategi melanggengkan identitas bersama tersebut adalah dengan melakukan “asimilasi”. Andrain mendefinisikan “asimilasi” sebagai suatu proses memper-samakan; yang dengan itu anggota-anggota masyarakat diharapkan untuk mengakui hanya satu sumber identitas (Andrain, 1992: 89). Dalam konteks dominasi penatua, praktek asimilasi terlihat dalam upaya-upaya sejumlah elit penatua mewacanakan beberapa jargon-jargon seperti “GMIM pilih GMIM” atau “aku cinta GMIM” (Manado Post, 12 November 2009). Beberapa jargon tersebut sengaja dibuat dalam rangka membangun suatu ekspresi nilai dalam masyarakat Minahasa sekaligus menegaskan bahwa semua orang wajib mengikuti nilai-nilai dari kelompok dominan, yakni GMIM. Nilai-nilai dominan ini harus ditaati oleh keseluruhan masyarakat sebagai nilai yang disepakati bersama termasuk dalam hal memilih pemimpin politik.

Memelihara Besaran Kekuasaan

Besaran kekuasaan berbicara mengenai besaran perilaku yang

dimodifikasi elit dalam masing-masing individu (masyarakat). Indikator ini sekaligus dapat mengukur efektivitas penguasaan elit terhadap perilaku masyarakat baik yang terbuka maupun tersembunyi. Hal ini penting untuk dikenali karena mengingat bahwa kekuasaan penatua di Minahasa tidak selamanya

mendapat dukungan, namun sering pula mendapat kecaman, bahkan oleh jemaatnya sendiri.

Sebuah penelitian mengemukakan bahwa ada kecenderungan penolakan dari sebagian jemaat atas aktivitas penatua di ranah politik khususnya keterlibatan dalam Partai Politik (Kaligis, 2004: 137)

Tabel 2.
Sikap Responden terhadap Keterlibatan Elit Gereja dalam Parpol

No	Jabatan gerejawi	Setuju	Netral	Tidak setuju	Jumlah
1	Pendeta	18	26	79	123
	Presentase	14,63%	21,14%	64,23%	100%
2	Penatua	32	39	52	123
	Presentase	26,01%	31,70%	42,27%	100%
3	Syamas	30	39	54	123
	Presentase	24,39%	31,70%	43,39%	100%

Sumber: Kaligis, *Persepsi Masyarakat Kristen...*, hal. 137

Bentuk-bentuk resistensi lainnya diekspresikan beberapa kalangan, seperti mahasiswa yang resah melihat sejumlah oknum penatua yang menduduki jabatan politik justru terlilit kasus korupsi. Meski demikian, nampak bahwa resistensi jemaat dapat dikelola secara piawai oleh sejumlah penatua yang bersangkutan, hingga tidak meluas menjadi konflik internal dalam gereja antara penatua dan jemaat. Di sisi lain, media massa lokal sebagai saluran aspirasi masyarakat

cenderung memberi ruang lebih kepada elit sehingga kritik sosial yang diberikan oleh non-elit tidak terekspos.

Besaran kekuasaan terus dipelihara penatua dalam melanggengkan dominasinya di berbagai ranah. Kebangkitan minat terhadap adat yang sempat menguat juga tidak mampu menandingi legitimasi gereja yang telah tertanam kokoh. Gereja masih dianggap sebagai sumber legitimasi utama masyarakat ketimbang lembaga-lembaga adat.

Namun, jika elit dapat terus memelihara sumber daya normativenya sebagai penatua gereja, dan di sisi lain dapat pula mengemukakan wacana-wacana adat secara bersama, niscaya besaran kekuasaan yang nantinya dihasilkan akan cenderung lebih dalam.

Penutup

Gereja bukanlah aktor yang berdiri sendiri dalam menampilkan perannya di ranah sosial-politik seperti misalnya pada kesimpulan Henley dkk (2007) dan Kumayas (2010). Institusi gereja, seperti GMIM yang kita kenal di Minahasa, nyatanya hanya berperan sebagai instrumen kekuasaan elit yang mewujudkan dalam sosok penatua. Dengan kata lain, elitlah yang memainkan peran-peran politik lewat gereja sebagai modal utama. Dari gereja inilah, ia memperoleh legitimasi awal yang kemudian berhasil dikonversi menjadi kekuasaan politik tingkat lokal.

Posisi-posisi puncak yang diduduki penatua dalam ranah gereja dan politik lokal di Minahasa, mengindikasikan bahwa penatua

adalah sosok elit yang berkuasa. Temuan ini sejalan dengan teori-teori klasik tentang elit dimana ada sekelompok minoritas yang menguasai anggota masyarakat yang lain. Berdasarkan konsepsi tersebut, sosok penatua di Minahasa dapat berada pada dua posisi, yakni *governing elite* dan *non governing elite* yang merupakan lapisan dalam kelompok minoritas tadi. Sebagai pemimpin dari suatu Kompeka GMIM (terutama di aras sinode), yang merupakan organisasi agama terbesar di Sulawesi Utara, mereka dapat saja mempengaruhi beberapa kebijakan pemerintah lokal yang bersangkutan dengan aktivitas komisi yang dibawahinya. Dalam kondisi tersebut, penatua bertindak sebagai *non governing elite*. Namun, sewaktu-waktu mereka juga dapat mendayagunakan jabatan kepenatuaannya itu untuk tujuan politis atau demi suatu jabatan di ranah politik. Dengan mengkonversi jabatan gerejawi menjadi jabatan politik, mereka beralih posisi menjadi *governing elite*.

Sementara itu, dari lima tipologi yang ditawarkan Andrain, sumber

daya normatif adalah jenis sumber daya yang paling menonjol digunakan penatua untuk mengkonversi kekuasaan mereka menjadi suatu jabatan politik. Akses terhadap sumber daya normatif ini berkenaan dengan jabatan kepenatuaannya dalam gereja. Sumber daya normatif menjamin hak moral penatua untuk memerintah di kalangan masyarakat yang telah memiliki suatu “identitas bersama”, yakni kekristenan yang membudaya. Sementara sumber daya lainnya seperti material, personal, dan keahlian lebih banyak digunakan dalam pertarungan di ranah internal gereja terutama dalam pilpelsus.

Meski demikian, ada hal yang sepertinya belum terungkap apabila mengikuti konsep Andrain mengenai “pendayagunaan sumber daya kekuasaan” dan “kepatuhan dari sasaran kekuasaan”. Indikator-indikator tersebut tidak menyediakan pisau analisis yang cukup menjelaskan mengapa gereja tetap bertahan menjadi sumber daya utama dalam masyarakat Minahasa. Kekristenan yang selalu terpelihara mengesampingkan unsur-unsur sumber daya lainnya dalam masyarakat, misalnya

adat. Penjelasan Andrain yang hanya sebatas pada proses-proses memperoleh suatu kekuasaan politik dan lalai untuk menjelaskan mengapa suatu sumber daya kekuasaan terus dihargai masyarakat secara terus menerus. Walaupun Andrain mengajukan strategi asimilasi sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan identitas bersama, namun dalam kenyataannya, praktik asimilasi yang dilakukan penatua bersifat temporer, yaitu hanya pada momen-momen politik tertentu. Bahkan, asimilasi yang berlangsung cenderung berujung pada resistensi sebagian jemaat dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, Leo. (2007). *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrain, Charles F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Assa, R.N. (2003). *Sejarah Ringkas GMIM (Gereja Masehi Injili di*

- Minahasa) 1934-2000*. Kakas: Christyoan.
- Berg, Bruce L. (2001). *Qualitative Research Methods For the Social Science*. Boston: Allyn & Bacon.
- BPMS GMIM. (2007). *Tata Gereja Gereja Masehi Injili di Minahasa 2007*. Tomohon: BPS GMIM.
- Gara, Nico. (2002). *Menafsir Alkitab Secara Praktis*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Giddens, Anthony. (2011). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pedati.
- Graafland, N. (1991). *Minahasa: Negeri, Rakyat, dan Budayanya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Haryanto. (1991). *Elit, Massa dan Konflik: Suatu Bahasan Awal*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PLOD UGM & JIP FISIPOL UGM.
- Henley, David, Maria J.C. Schouten, dan A.J. Ulaen. (2007). "Memelihara Perdamaian di Minahasa Pasca-Orde Baru", dalam *Politik Lokal di Indonesia*, diedit oleh Henk Schultze Nordholt dan Gerry van Klinken. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Kaligis, Djonlie Ronald. (2004). *Persepsi Masyarakat Kristen Terhadap Partisipasi Elit Gereja dalam Politik dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional (Studi Kasus di Gereja Masehi Injili di Minahasa)*, tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
- Kumayas, Neni. (2010). *Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dalam Konstelasi Politik di Sulawesi Utara*, tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
- Lundström-Burghoorn, Wil. (1981). *Minahasa Civilization, A tradition of change. [Gothenburg Studies in Social Anthropology 2.]*. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Mamengko, Roy E (ed). (2002). *Etnik Minahasa dalam*

- Akselerasi Perubahan: Telaah Historis, Teologis, Antropologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nordholt, Henk Schultze dan Gerry van Klinken. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta:KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia
- Pantouw, Bertha. 2002. "Minahasa Sebelum Tahun 1829 dan Beberapa Perubahan Dalamnya, Kurun Waktu 1824-1846", dalam *Etnik Minahasa Dalam Akselerasi Perubahan: Telaah Historis, Teologis, Antropologis*, diedit oleh Roy E. Mamengko. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Putnam, Robert D. 1978. "Studi Perbandingan Elit Politik", dalam *Perbandingan Sistem Politik*, diedit oleh Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schouten, M.J.C. 1998. *Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa, 1677-1983*. Leiden: KITLV Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Varma S.P. 1999. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafind.Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research: Design and Methods (Third ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Internet:**
- Gmim. (Februari, 2015). Sejarah singkat gmim. Diakses dari: <http://www.gmim.or.id/sejarah-singkat-gmim/>
- Harian Kawanua Post. (29 Maret, 2014). Diakses dari: <http://www.hariankawanuapost.com/wp/2014/03/29/ada-ketua-parpol-di-mps/>
- Majalah:**
- Manado Post, 7 Agustus 2000.
- Manado Post, 12 November